

BAB IV

PENTINGNYA SEKTOR ENERGI DAN BAHAN BAKAR FOSIL BAGI PARTAI REPUBLIK

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai orientasi Donald Trump dan keyakinan Republican sejalan dengan platform yang diangkat oleh Partai Republik terhadap keuntungan dan kepentingan ekonomi dalam sektor energi adalah penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan dominasi AS di dunia dan ekspansi pasar energi AS di dunia.

Peran Amerika Serikat dalam isu lingkungan global dalam skala internasional selama ini memang sangat lemah. AS tidak pernah benar-benar *concern* dalam isu perubahan iklim apalagi terkait reduksi gas rumah kaca yang kini semakin menjadi ancaman yang nyata. Meskipun AS terlibat dalam beberapa agenda UNFCCC termasuk dalam penandatanganan *Kyoto Protocol 1997*, namun AS tidak sampai meratifikasinya. Hingga pada tahun 2016, AS di bawah kepemimpinan Barack Obama melakukan terobosan baru yang begitu diharapkan dunia internasional yakni berupa diratifikasinya *Paris Agreement* sekaligus menjadi penyumbang dana aktif di dalamnya. Namun, ratifikasi AS terhadap *Paris Agreement* ternyata tidak bertahan lama karena setelah pergantian kekuasaan dari era Presiden Barack Obama ke era Presiden Donald Trump, Trump menegaskan akan membawa AS keluar dari *Paris Agreement* pada tahun 2027.

4.1. Ketidaksesuaian Platform Partai Republik dengan *Paris Agreement*

Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara *superpower* yang diharapkan oleh negara-negara lain di dunia untuk menjadi pemimpin global yang sesuai atau sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat internasional dalam berbagai isu. Aksi iklim dan kebijakan-kebijakan iklim AS dinilai lemah, terutama yang berkenaan dengan isu perubahan iklim akibat gas karbon rumah kaca, baik dalam skala domestik maupun global. Misalnya, seperti

pada masa pemerintahan George H W Bush yang secara tegas menyatakan penolakannya terhadap aksi iklim dengan mereduksi gas rumah kaca dalam tindakan apapun. Seperti yang tercatat dalam platform Partai Republik bahwa permasalahan perubahan iklim bukanlah permasalahan yang darurat karena melihat kenyataan yang dirasakan masyarakat AS secara langsung bahwa naiknya temperature bumi sungguh tidak masuk akal, di mana pada kenyataannya, musim dingin udara di sebagian kawasan AS semakin dingin serta beberapa kejadian badai es juga memperjelas argument skeptisme mereka. Kalangan Republik juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan ancaman yang mungkin akan menjadi hambatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan dominasi AS sebagai satu-satunya negara *superpower* di dunia.

Perbedaan kepentingan dari negara-negara maju dan negara berkembang memang menjadi salah satu tantangan dan hambatan terhadap keberhasilan upaya negosiasi iklim dalam *Paris Agreement* karena tujuan dan mekanisme aksi iklim yang disepakati di *Paris Agreement* akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian suatu negara maju, seperti halnya AS. Negara maju dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengurangan emisi gas karbon dunia karena tingkat aktivitas industri yang lebih besar secara keseluruhan. Sedangkan, kemampuan negara-negara berkembang untuk mengurangi gas emisi karbon mereka dirasa belum cukup memadai.

Kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi AS sebagai komitmen yang disepakati dalam *Paris Agreement* menjadi salah satu pertimbangan utama dari keputusan Trump untuk menarik AS keluar dari *Paris Agreement* adalah kesepakatan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Pada Pasal 9 *Paris Agreement* berisi mengenai kewajiban negara maju dalam kontribusi keuangan dan sumber daya yang lebih besar dari negara-negara berkembang atau negara *Non-Annex 1*. Sejak tahun 2013, sebesar \$ 10,3 telah disumbangkan oleh negara-negara industry besar untuk membantu negara-

negara berkembang mereduksi emisi karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim. AS sendiri telah menjanjikan pendanaan sebesar \$ 3 miliar, meskipun banyak negara lain yang menyumbangkan lebih dari AS, nilai tersebut tetap saja dianggap tidak sepadan dengan keuntungan yang didapatkan AS. Jika AS memenuhi komitmen tersebut, maka menjadi sebesar \$ 10 per orang Amerika. Namun, jika hanya berhenti di \$ 1 miliar yang telah diberikan Obama, maka tidak lebih dari \$ 3 per orang. Sedangkan, negara-negara lain banyak yang menyumbangkan lebih, misalnya Swedia yang memberikan pendanaan sebesar \$ 60 per-orang.⁶⁰

Pada Pasal 10 menjelaskan tentang pentingnya transfer teknologi, dan pada Pasal 11 menyatakan pentingnya upaya kolektif antar negara dan perlunya tindakan negara maju untuk secara bersama-sama membantu meningkatkan kapasitas di negara-negara berkembang sehingga tujuan *Paris Agreement* dapat tercapai.⁶¹ Negara-negara maju juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan laporan yang konsisten dan seluruhnya transparan mengenai pemberian pendanaan yang telah dilakukan dan dilakukan secara berkala. Ketentuan ini juga tentu saja berlaku dan mengikat juga bagi AS. Trump juga menekankan kembali doktrin “*American First*” yang isolasionalis untuk membangun kembali kejayaan Amerika. Berbeda dengan kalangan Demokrat yang justru memahami bahwa bergabungnya AS dalam *Paris Agreement* akan menjaga keunggulan kompetitif dan peluang kerja di AS melalui promosi ekonomi rendah karbon dan energy terbarukan. Trump menilai bahwa *Paris Agreement* justru akan merusak kedaulatan AS sebagai pemimpin global dengan

⁶⁰ Nadja Popovich, Henry Fountain, “*What Is the Green Climate Fund and How Much Does the U.S. Actually Pay?*”, diakses dari <https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/02/climate/trump-paris-green-climate-fund.html> pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 19.54 WIB

⁶¹ Climate Focus, “*The Paris Agreement Summary*”. Climate Focus Client Brief on the Paris Agreement III 28 December 2015 hlm. 1-5

sistem pelaporan yang ada dan kesepakatan yang tidak adil melalui beban pembiayaan mitigasi yang tidak proporsional.

Polarisasi politik berupa menguatnya keberpihakan ideologi dan munculnya ketegangan sosial di AS dewasa ini semakin mempertegas keputusan Trump untuk keluar dari *Paris Agreement*. Administrasi Trump yang didasarkan pada platform Partai Republik yang menegaskan pentingnya peningkatan produksi dan ekspor energy yang berkaitan erat penggunaan bahan bakar fosil. Tujuan dan mekanisme *Paris Agreement* memang tidak secara substantif menuntut negara untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, namun melalui mekanisme pelaporan dan tujuan mereduksi emisi gas karbon akan mempengaruhi perekonomian AS terutama industri-industri unggulan AS, seperti produksi energi berupa batu bara, minyak, dan gas alam. Industri-industri yang erat hubungannya dengan bahan bakar fosil ini juga erat hubungannya pula dengan kelompok-kelompok kepentingan dan pendukung Partai Republik, utamanya dari kalangan pebisnis di mana kelompok-kelompok tersebut memiliki pengaruh politik yang kuat. Begitu Donald Trump terpilih menjadi presiden ke-45 AS, ia didesak oleh 22 senator Republik AS untuk segera menarik AS keluar dari *Paris Agreement* dan diketahui bahwa kampanye dari 22 senator tersebut telah mengumpulkan lebih dari 10 juta dollar AS dari batu bara, minyak, dan gas sejak 2012.⁶²

4.2. Ekspansi dan Dominasi Ekonomi AS

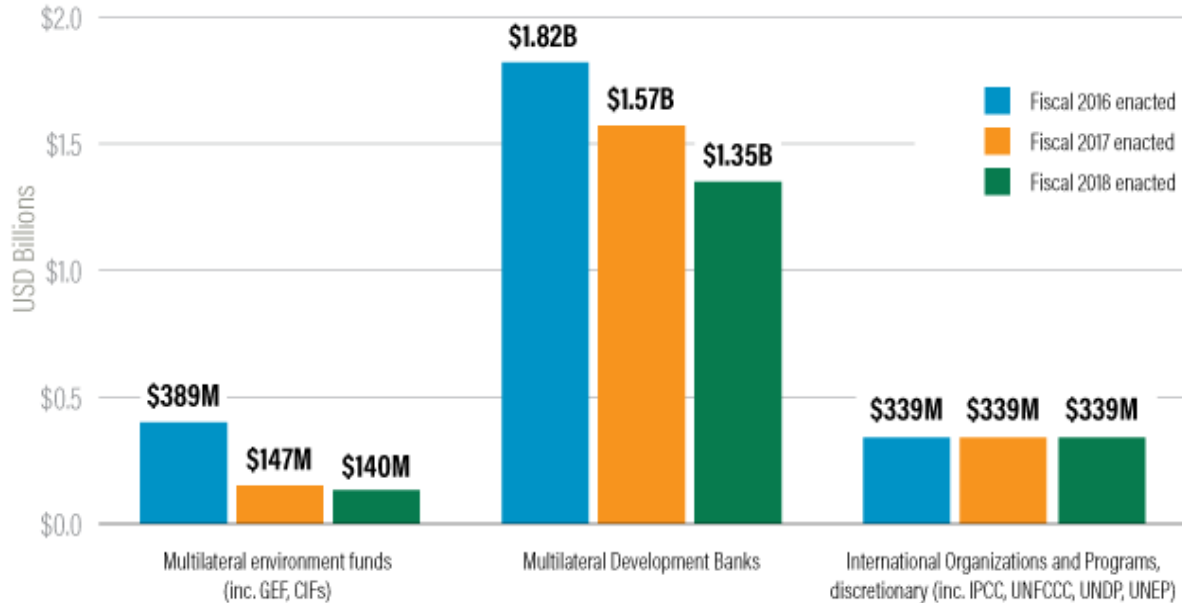
Dalam konteks ini, tidak hanya preferensi pribadi yang menjadi pengaruh kuat terhadap penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* oleh Presiden Donald Trump, namun kondisi perpolitikan atau dukungan politik yang kuat dari dalam negeri dari partai berkuasa dan pendukungnya sekaligus asal partai Trump (Partai Republik) turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut,

⁶² Zang Hai-Bin. "U.S. Withdrawal From The Paris Agreement: Reasons, Impacts, and China's Response". *Advances in Climate Change Research* 8 (2017), hlm 222

utamanya terkait dengan kepentingan domestik dalam bidang ekonomi yang dinilai menjadi aspek atau faktor utama yang menyebabkan banyaknya perubahan kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Merujuk kembali pada platform Partai Republik yang menyebutkan bahwa isu perubahan iklim bukanlah merupakan isu yang sangat serius sehingga diperlukan langkah-langkah penting dan pembiayaan yang besar dan lebih penting untuk mendukung penuh tujuan mengembalikan kejayaan Amerika Serikat melalui penguatan sektor industri dan manufaktur dalam bidang ekonomi..

AS telah menjadi salah satu dari donor utama dalam hal pembiayaan penyediaan fasilitas dan teknologi bersama Jepang, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Swedia, dan Norwegia di mana AS menyumbang sekitar 21% dari total saham senilai US \$ 9,6 miliar antara 2011 dan 2012. Secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan AS untuk berkontribusi dalam dalam aksi iklim global dapat dirincikan seperti dalam bagan di bawah ini:

Grafik 4.1. Dana AS dalam Aksi Iklim Global tahun 2016-2018



Sumber: *World Resources Institute*

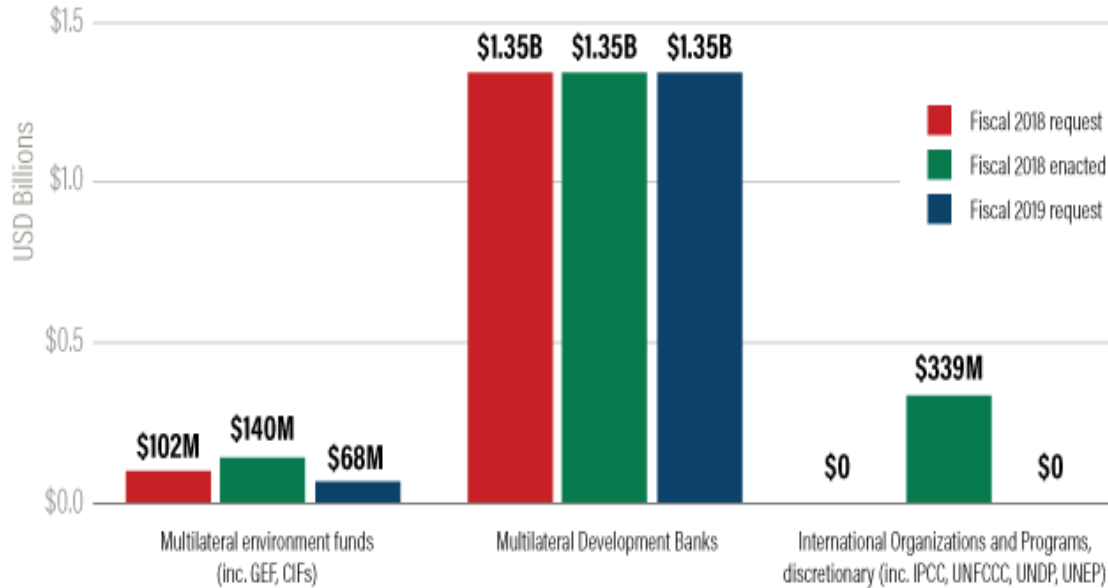
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa selama masa pemerintahan Presiden Donald Trump, pendanaan dalam aksi iklim terus menurun. Bantuan pendanaan iklim AS disalurkan melalui *United States Department of Energy* yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan pengembangan energi bersih dengan tujuan adaptasi perubahan iklim sebesar \$ 608 juta per tahun, selebihnya digunakan untuk mendukung upaya adaptasi perubahan iklim sebesar \$ 207 juta per tahun dan \$ 208 juta per tahun digunakan untuk perlindungan hutan hujan di daerah tropis dan keanekaragaman hayatinya.⁶³

Pada pemerintahan Presiden Donald Trump, terjadi pemotongan tajam pada pendanaan iklim global oleh AS. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa pada tahun 2016, penetapan dana iklim yang diberlakukan oleh Kongres sebesar \$389 juta untuk pendanaan iklim multilateral, \$1,82 milyar *Multilateral Development Bank*, dan \$339 untuk program-program internasional dan organisasi organisasi. Tahun 2017, pendanaan turun menjadi \$147 juta untuk pendanaan iklim multilateral, 41,57 milyar untuk *Multilateral Development Bank*, dan \$399 juta (tetap) untuk pendanaan program dan organisasi internasional. Terus menurun hingga 2018 sebesar \$140 juta untuk pendanaan iklim multilateral, \$135 milyar untuk *Multilateral Development Bank*, namun pendanaan untuk program dan organisasi internasional tidak berubah selama 3 tahun terakhir. Pemotongan pendanaan iklim global ini juga akan berdampak pada melemahnya otoritas negosiasi iklim di masa mendatang dikarenakan kualitas laporan IPCC yang melemah.⁶⁴

⁶³ Timmons Roberts, Caroline Jones, “*American soft power, the Paris Agreement, and climate finance under Trump*”, diakses dari <https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2017/02/24/american-soft-power-the-paris-agreement-and-climate-finance-under-trump/> pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 20.33 WIB

⁶⁴ Op. cit.

Grafik 4.2. Pengajuan Dana Donald Trump vs Penetapan Dana oleh Kongres AS tahun 2018



Sumber: *World Resources Institute*

Penetapan dana iklim yang dikeluarkan oleh Kongres memang terus menurun dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, tidak setajam pemotongan dana yang diminta oleh Donald Trump. Berdasarkan diagram di atas, tercatat bahwa dana yang ditetapkan oleh Kongres untuk mendukung pendanaan iklim multilateral sebesar \$140 milyar, di mana jauh lebih besar dari penetapan dana yang diminta Trump. Sedangkan, untuk dana *Multilateral Development Bank* disetujui dengan jumlah yang sama pada tahun 2018 hingga 2019. Namun untuk pendanaan sejumlah program dan internasional termasuk IPCC, UNFCCC, UNDP, hingga UNEP, Trump mengajukan permintaan pemotongan dana tajam hingga \$0 pada tahun 2018 maupun 2019, namun Kongres menetapkannya menjadi \$339 juta. Sejak awal Trump memang telah berusaha untuk menghentikan pendanaan iklim global dalam *Green Climate Fund*, instrument pendanaan yang digunakan dalam *Paris Agreement*.⁶⁵ Apalagi sejak masa pemerintahan Obama tahun 2015, AS telah menjadi kontributor yang besar dalam penelitian iklim didukung oleh pendanaan dana yang besar hingga berhasil menyumbang 58% dari 100 jurnal iklim mencapai 120.000 yang paling banyak dikutip. 23% berasal dari AS lebih banyak daripada negara lain manapun. Antara tahun 2010 dan 2016, ilmuwan AS menyumbang 2.247 dari 4.089 (54,95%) artikel mengenai *climate change* yang diterbitkan dalam tujuh jurnal ilmiah terkemuka.⁶⁶

Biaya operasional *Paris Agreement* yang mahal serta kesepakatan-kesepakatan yang dianggap merugikan Amerika Serikat karena dapat menghilangkan ratusan ribu lapangan pekerjaan, merusak industry-industri manufaktur, dan menghancurkan sekian triliun produk domestik bruto di masa mendatang di mana hal tersebut justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika dan menurunkan peluang serta

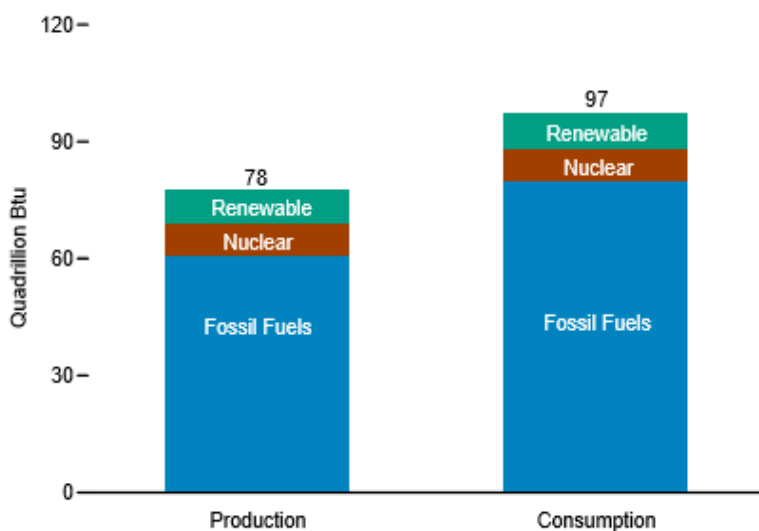
⁶⁵ Fadhlán Nur Hakiem, “Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement”. Dauliyah, Vol. 3, No. 2, July 2018, hlm. 164.

⁶⁶ Ibid., hlm. 223.

melemahkan industry-industri asal Amerika Serikat karena bentuk kesepakatan yang dinilai menekan negara-negara maju untuk berkontribusi lebih besar baik dalam hal dukungan finansial, alih teknologi, maupun kapasitas pembangunan untuk memberi bantuan kepada negara-negara berkembang sehingga negara-negaraberkembang dapat mengatasi dampak perubahan iklim sesuai dengan target emisi gas karbon yang disepakati.

Dengan klaim bahwa *Paris Agreement* bukan mengacu pada persoalan keuntungan dari energy terbarukan atau keuntungan ekonomi secara lebih luas, namun mengacu pada persoalan pengembangan sumber daya dan bagaimana negara-negara di dunia dapat saling menjaga lingkungan hidup secara kolektif agar upaya yang dilakukan lebih efektif. Dibandingkan menggunakan pendanaan untuk adaptasi maupun mengatasi dampak perubahan iklim yang dampak belum secara langsung dirasakan oleh masyarakat Amerika, lebih baik mengalokasikannya untuk kepentingan yang lain, utamanya energi. Kepentingan yang menjadi agenda utama dalam Platform Partai Republik adalah pengembangan teknologi dan produksi serta ekspor energi AS. Untuk lebih memperjelas pembahasan, berikut penulis cantumkan tingkat konsumsi dan produksi AS (merujuk pada data terakhir pada tahun 2011):

Grafik 4.3. Produksi dan Konsumsi Energi AS



Sumber: *U. S. Energy Information Administration, based on U. S. Census Bureau Export and Import data*

Berdasarkan diagram di atas, jumlah produksi energi AS mencapai 78 quadriliun (\$1,000,000,000,000,000) Btu dan tingkat konsumsi energi AS mencapai 97 quadriliun Btu (*British Thermal Unit*), satuan energi yang digunakan di AS). Tingkat konsumsi energi AS yang tinggi juga mendorong peningkatan produksi energi AS juga semakin tinggi agar dapat mengimbangi besarnya penggunaan energi AS. Sebagian besar konsumsi maupun produksi energi AS masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil. Sekitar 78 Quadriliun Btu untuk produksi dan sekitar 97 Quadriliun Btu untuk kebutuhan produksi energi AS. Industri AS sendiri memang masih sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, di mana impor utama AS merupakan minyak mentah sedangkan ekspor utamanya yakni berupa produk hasil pengolahan minyak mentah tersebut

dalam bentuk produk petroleum yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia diikuti dengan batu bara dan minyak bumi.⁶⁷

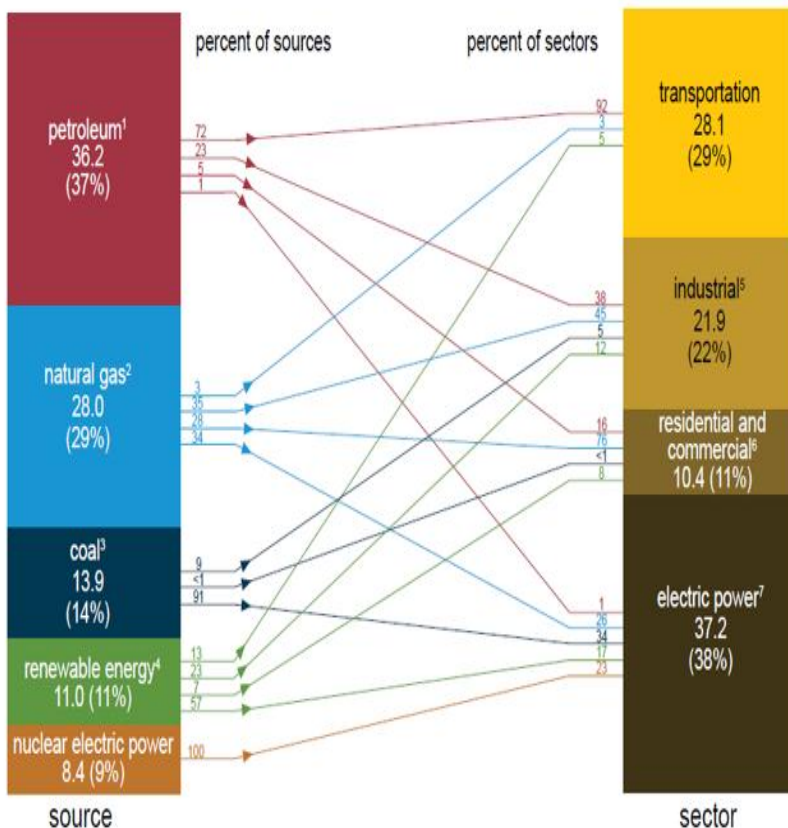
Tidak mudah bagi AS untuk serta merta menggantikannya dengan bentuk energi terbarukan. Energi terbarukan juga sudah banyak digunakan dan menyumbang sekitar 24% gigawatts penggunaan kapasitas listrik baru di AS selama tahun 2016. Meski demikian, berdasarkan data tersebut, bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama yang digunakan untuk sebagian besar aktivitas-aktivitas perindustrian dan kegiatan-kegiatan ekonomi yakni sekitar 77,6% (60 quadrillion Btu) dari produksi energi primer AS (tercatat pada tahun 2017) dan 78 quadrillion Btu untuk tingkat konsumsi energi AS primer AS.⁶⁸ Penggunaan energi terbarukan di AS memang perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan.

⁶⁷ *U. S. Energy Information Administration, based on U. S. Census Bureau Export and Import data*

⁶⁸ *Loc.cit.*

Grafik 4.4. Konsumsi Energi Primer AS berdasarkan sumber dan sektor tahun 2017

Total = 97.7 quadrillion British thermal units (Btu)



Sumber: U. S. Energy Information Administration, based on U. S. Energy Facts Explained

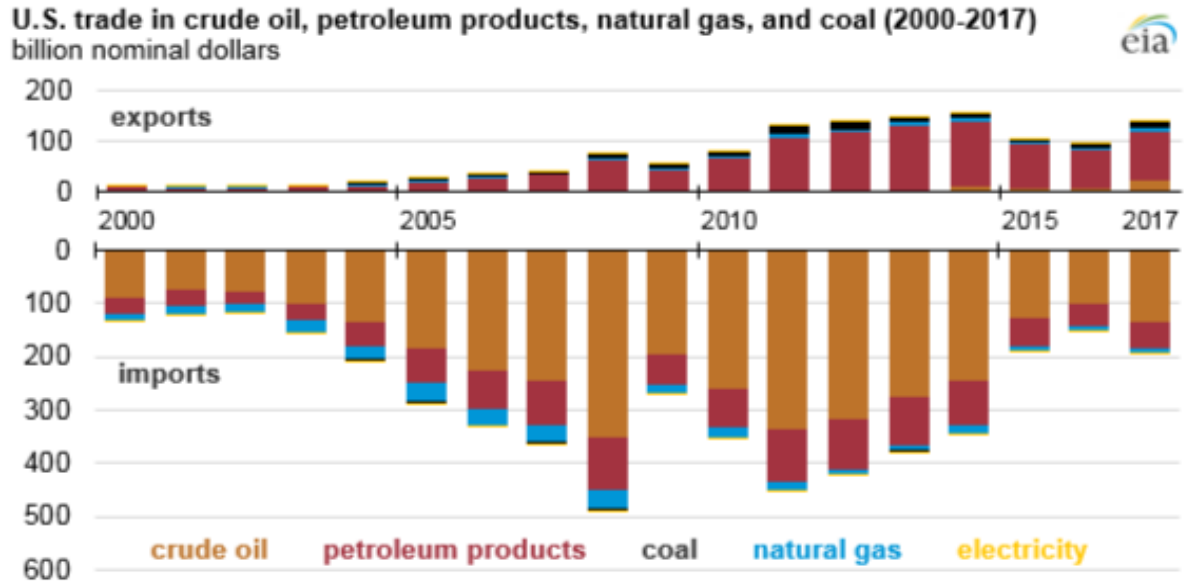
Besarnya perhatian Partai Republik pada sektor energi menunjukkan bahwa energi sangat penting dan membawa keuntungan yang sangat besar bagi AS. Berdasarkan data di atas bahwa total konsumsi energi primer AS sebesar 97,7

kuadriliun atau setara dengan 97.728.000.000.000 Btu (1 kuadriliun=1000 triliun) yang digunakan dalam daya listrik 38,1%, transportasi 28,8%, industri 22,4%, dan perumahan sebesar 6,2%. Sedangkan, total produksi energi AS sekitar 89,6% dari tingkat konsumsi AS atau setara sekitar 87,5 kuadriliun Btu meliputi gas alam 31,8%, minyak bumi 28,0%, batubara 17,8%, energi terbarukan 12,7%, tenaga listrik nuklir 9,6%. Produksi baru bara meningkat hingga 6% pada tahun 2017. Sedangkan, konsumsi energi terbarukan pada tahun 2017 mencapai 11 kuadriliun Btu.

Penggunaan bahan bakar fosil dinilai lebih sangat efektif daripada energi bersih dan terbarukan meskipun dewasa ini lebih mahal namun mudah ditemukan, tersedia dalam jumlah yang banyak di mana AS diketahui merupakan negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia, mudah dipindahkan atau didistribusikan, memberikan peluang kerja yang banyak, dan lebih mudah diatur asalkan bahan bakar untuk dijadikan tenaga tersedia. Berbeda dengan energi terbarukan yang tidak terbatas namun bergantung pada sumber-sumber alami seperti matahari, air, angin, serta biaya pembangunan teknologi dan eksplorasi atau pemeliharaan bisa menjadi tinggi dan tidak lebih efektif dan efisien dalam penyaluran atau transport energi. Menurut Abby Ross Hopper, Presiden *Solar Energy Industries Association* yang berbasis di Washington, 13 dari 25 distrik Kongres terbaik dengan kapasitas *Solar Energy* terbaik diwakili oleh Partai Republik.

Statistika data ekspor dan impor AS dari tahun 2000 hingga 2017 dapat dilihat dalam diagram berikut:

Grafik 4.5. Ekspor dan Impor Sektor Energi AS tahun 2000-2017



Source: U.S. Energy Information Administration, based on U.S. Census Bureau Export and Import data

Sumber: U. S. Energy Information Administration, based on U. S. Census Bureau Export and Import data

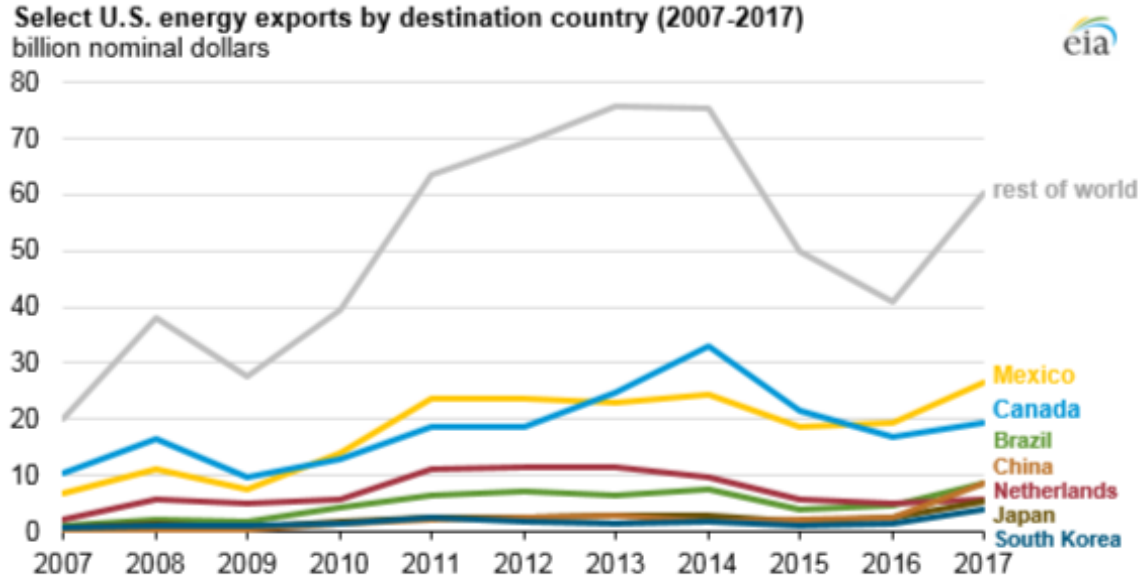
Berdasarkan data dari Biro Sensus AS, tingkat ekspor dan impor AS terus meningkat signifikan. Hal tersebut didorong oleh tingkat konsumsi energi yang juga tinggi di AS. Sejak tahun 2003 hingga 2007, nilai impor energy AS telah meningkat hingga 10 kali lebih besar dari nilai ekspor mencapai lebih dari \$400 milyar pada 2007. Tingkat impor energy AS menurun sangat signifikan menjadi 1,5 kali lipat dari ekspor energi AS pada tahun 2007. Dua pertiga dari total nilai impor energi AS berupa minyak mentah, termasuk produk minyak bumi seperti LPG, bahan bakar diesel, dan bensin. Mitra dagang energi terbesar AS adalah Kanada. Import energy dari Kanada AS pada tahun 2017 mencapai \$ 73 miliar, diikuti oleh Arab Saudi kemudian Venezuela, Meksiko, Iraq, Kolumbia, dan Rusia.⁶⁹ Mitra-mitra dagang energy utama AS tersebut menyumbang 72% dari total nilai energy AS.⁷⁰ Sedangkan, ekspor sebagian besar jenis energi yang diekspor AS berupa hasil dari olahan minyak mentah yaitu produk petroleum yang digunakan sebagai bahan baku industry petrokimia.

AS telah mendistribusikan minyak mentah lebih dari 7 juta barrel per-hari ke berbagai negara-negara tujuan ekspor AS yang telah menghabiskan hingga 17 barrel per hari sehingga AS dapat mendapat pasokan yang sangat besar sehingga AS dapat menjadi pemasok utama energi dunia. Pada tahun 2018 di bawah kepemimpinan Donald Trump, untuk pertama kalinya setelah 75 tahun AS menjadi negara net-eksportir minyak mentah sebagai terobosan baru untuk mengurangi ketergantungan AS terhadap impor minyak mentah. Mengenai negara tujuan ekspor energi AS penulis cantumkan data grafik berikut:

⁶⁹ Op. cit.

⁷⁰ U. S. Energy Information Administration, “*Today In Energy*“, diakses dari <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37253> pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 20.31 WIB

Grafik 4.6. Eksport Energi AS berdasarkan Negara Tujuan tahun 2007-2017



Source: U.S. Energy Information Administration, based on U.S. Census Bureau Export and Import data

Sumber: U. S. Energy Information Administration, based on U. S. Census Bereau Export and Import data

Berdasarkan grafik di atas, ekspor energi AS pada tahun 2017 telah jauh meningkat daripada tahun 2007, utamanya di tujuh negara utama yang secara konsisten menjadi tujuan ekspor energy AS yakni, Mexico, Canada, Brazil, China, Netherland, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuan utama AS adalah Brazil, diikuti oleh China yang telah menjadi cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu sumber utama impor AS. Tujuan ekspor energy AS lebih luas dari pada impor AS.⁷¹ Dengan tujuan menciptakan ketergantungan negara-negara di dunia terhadap pasokan energi AS, maka negara-negara tujuan ekspor AS juga lebih luas, diantaranya termasuk negara-negara berkembang. Pengembangan produksi dan ekspor energy AS juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, ekspor energi AS telah terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tajam impor energi AS dan lonjakan ekspor energi AS merupakan hasil yang luar biasa dari pergerakan energi AS yang sangat dramatis dalam beberapa dekade terakhir.⁷²

Tujuan reduksi gas emisi karbon atau gas rumah kaca tentu saja akan berimbas secara tidak langsung terhadap perekonomian di negara-negara berkembang. Platform Partai Demokrat yang sangat pro energi melihat bahwa kesepakatan dan ketentuan yang melibatkan AS dalam *Paris Agreement* akan sangat mempengaruhi pergerakan ekspor dan impor energi AS. Tingginya tingkat konsumsi AS yang tinggi juga mendorong tingkat produksi energi AS yang sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil dengan berbagai pertimbangan yang telah dijelaskan di atas di mana penggunaan bahan bakar fosil ini lebih efektif dalam menghasilkan keuntungan bagi AS. Penurunan emisi gas

⁷¹ Loc.cit.

⁷² Mutia Fauzia, “Untuk Pertama Kalinya dalam 75 Tahun, AS Jadi Net Eksportir Minyak Mentah”, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/12/105000226/untuk-pertama-kalinya-dalam-75-tahun-as-jadi-net-eksportir-minyak-mentah> pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 20.44 pukul WIB

karbon dapat dicapai dengan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi bahan bakar utama industri-industri AS, utamanya kepentingan untuk kebutuhan produksi dan ekspor energi AS berupa produk petroleum, batu bara, dan gas alam karena dinilai lebih efektif meskipun mahal namun lebih mudah ditemukan, lebih efisien dalam proses pembangunan teknologi hingga distribusi energi.

Dengan berkurangnya tingkat produksi perhari maupun jangka waktu yang lebih panjang dalam pengelolaan energi terbarukan dapat mengurangi efisiensi ekspor energi AS, di mana hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan negara-negara tujuan ekspor AS terhadap pasokan energi AS sebagai pemasok utama yang memasok energi-energi berupa produk petroleum sebagai produk ekspor utama AS termasuk batubara serta gas alam. termasuk diantaranya batu bara. AS juga merupakan pemasok utama batubara didunia, kedua terbesar setelah Chinayang tercatat mencapai 11% dari total kebutuhan batu bara dunia di mana 37% produksi listrik AS bergantung pada batu bara. AS juga merupakan negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia sebesar 237 miliar ton.⁷³ Tingginya tingkat produksi dan ekspor utama AS dalam jenis energi produk petroleum, batu bara, dan gas alam ini menjadi pertimbangan utama yang mendorong Trump menarik AS keluar dari *Paris Agreement*.⁷⁴

Pada tanggal 1 Juni 2017, Trump mengumumkan bahwa ia akan menarik AS dari Paris Agreement dan menghentikan kontribusi keuangan AS untuk *Paris Agreement*. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2017, Trump kembali memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keterlibatan AS dalam *Paris Agreement* yang lebih mempertegas keputusan untuk menarik diri dari kesepakatan. Selain itu, AS juga telah mengajukan dokumen penarikan diri

⁷³ World Atlas, “The Top 10 Coal Producers Worldwide”, diakses dari <https://www.worldatlas.com/articles/the-top-10-coal-producers-worldwide.html> pada 7 Maret 2019 pukul 21.37 WIB

⁷⁴ Op. cit.

ke PBB secara resmi tanpa bermaksud untuk keluar dari UNFCCC. Secara teknis, penarikan diri AS dari kesepakatan berarti mengurangi beban tanggungjawab keterlibatan AS dalam kesepakatan tersebut terutama mengenai kontribusi keuangan. Penarikan diri AS dari *Paris Agreement* diklaim dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi AS sebanyak 3%. Kesepakatan tersebut membutuhkan pendanaan mencapai \$ 100 miliar pertahun guna mendukung *Green Climate Fund* di mana AS menggelontorkan dana hingga \$ 1 miliar pada masa pemerintahan Obama yang dilakukan Obama tanpa seizin Kongres AS.⁷⁵

Mekanisme *Paris Agreement* ini bukan dengan meminta negara-negara terlibat untuk mengurangi emisi gas karbon di negara mereka secara substantif, namun meminta negara-negara tersebut mematuhi procedural pelaporan terhadap upaya domestik yang akan ditinjau secara berkala. UNFCCC membagi kategori negara anggota menjadi tiga, yaitu:

1. *Annex 1* yang meliputi negara-negara industry maju yang juga merupakan bagian dari OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dan negara-negara yang tengah mengalami transisi ekonomi (EITs) seperti Rusia, Baltik, dan Eropa Timur.
2. *Non-Annex 1* sebagian besar merupakan negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama negara-negara yang sangat bergantung pada industry.
3. *Least-Developed Countries* (LDCs) adalah negara-negara yang diberikan pertimbangan khusus oleh PBB karena kapasitas negara yang tidak mumpuni untuk merespon perubahan iklim sehingga memerlukan dana dan alih teknologi dalam rangka adaptasi dan reduksi

⁷⁵ The Heritage Foundation, “4 Reasons Trump Was Right to Pull Out of the Paris Agreement”, diakses dari <https://www.heritage.org/node/322912/print-display> 9/26/2018 pada tanggal 26 September 2018 pukul 14.59 WIB

emisi gas karbon untuk mencapai tujuan rezim perubahan iklim global melalui *Paris Agreement*.

Didalam *Paris Agreement* terdapat diferensiasi diantara negara maju dan negara berkembang yang ditentukan dalam golongan negara *Annex 1* dan negara *Non-Annex 1*. Negara *Annex 1* meliputi negara-negara maju yang dianggap dapat segera mereduksi emisi gas karbon, sedangkan negara *Non-Annex 1* meliputi negara-negara berkembang yang dianggap belum siap untuk segera melakukan reduksi emisi gas karbon. Prinsip hukum internasional yang menyatakan tanggung jawab sama namun berbeda menjadi faktor utama yang mempengaruhi adanya dua kategori tersebut. China menjadi salah satu negara yang menjadi perhatian dan sangat diperhitungkan oleh AS (terutama *Republican*) karena ekspansi ekonomi dan perdagangan China yang berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade ini sekaligus penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Meskipun pertumbuhan ekonomi China tergolong tinggi dan pesat, namun tingkat penduduk berpenghasilan rendah (kurang dari 1,25 dollar per-hari) juga masih sangat tinggi. Oleh karena itu, China masih termasuk dalam golongan negara berkembang.

Beban yang dirasa tidak proporsional oleh negara-negara maju membuat sistem pembagian *Annex* tersebut mempengaruhi kurangnya partisipasi dari beberapa negara dengan tingkat emisi yang tinggi misalnya China dan India yang juga merupakan pemain kunci bersama AS dalam *Paris Agreement*. Posisi China sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar dan India sebagai penghasil emisi karbon terbesar ketiga setelah AS namun keduanya tergolong dalam negara *Non-Annex 1* sehingga keduanya memiliki ketentuan pengurangan emisi yang lebih fleksibel berdasarkan tingkat dan perkembangan pembangunan China maupun India. Hal inilah kemudian menyebabkan ketidaktertarikan negara maju untuk serius memenuhi komitmen yang disepakati dalam *Paris Agreement* karena dapat membatasi perkembangan industry di negara-negara maju, termasuk AS sebagai salah satu dari negara *Annex 1*.

Panjangnya upaya adaptasi perubahan iklim melalui reduksi emisi gas karbon melalui *Kyoto Protocol* hingga *Paris Agreement* belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan dari yang ditargetkan. Konsep “prinsip umum namun berbeda tanggung jawab” ini menjadi permasalahan karena China sebagai negara penghasil karbon terbesar di dunia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengurangan emisi global meskipun posisinya sebagai negara berkembang. Sedangkan, sebaliknya, China merespon perubahan iklim dan menganggap bahwa negara majulah yang justru memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena sejarah aktivitas industry yang lebih besar dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, China melakukan berbagai upaya negosiasi diplomasi dengan AS sebagai negara maju sekaligus penghasil emisi karbon terbesar kedua setelah China.⁷⁶

Instrumen yang efektif untuk mempengaruhi negosiasi perubahan iklim global yang dapat dilakukan oleh negara berkembang adalah melalui diplomasi iklim untuk membangun kepercayaan global. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh China. China juga telah menempuh langkah-langkah penting dengan dilakukannya pertemuan bilateral dengan AS untuk membahas mengenai permasalahan lingkungan global dan perubahan iklim pada tanggal 22-25 September 2015, 30 November 2015 di Paris, 31 Maret 2016 di *Washington Convention Center*, 7 Juni 2016 di Beijing, 3 September 2016 di Hangzhou, Tiongkok dan pertemuan pada sela pertemuan *Group of 20 (G20) Summit*. Melalui kesepakatan yang telah disepakati dalam Copenhagen Accord bahwa negara-negara maju akan berkontribusi memberikan pendanaan mencapai \$ 100 Milyar mulai 2020 dalam rangka upaya adaptasi perubahan iklim kepada negara-negara berkembang dan negara-negara kecil kepulauan yang rentan

⁷⁶ Ayatullah Komeini, “*Diplomasi Tiongkok Terhadap Amerika Serikat Dalam Paris Agreement Tahun 2015-2016*”. JOM FISIP Universitas Riau. Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, hlm. 7.

terkena dampak buruk perubahan iklim.⁷⁷ AS juga menjadi pendonor utama dalam CGF. Peran kunci AS dalam *Paris Agreement* tersebut berhasil membentuk identitas AS dalam rezim perubahan iklim.⁷⁸

Posisi China dan India sebagai negara berkembang namun memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekonomi dan dominasi Amerika Serikat sebagai negara adidaya apabila tetap meneruskan komitmen dalam *Paris Agreement*. Mengingat posisi China sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia dan India penghasil karbon terbesar ke tiga setelah AS dari rata-rata pembagian emisi karbon global, maka posisi kedua negara tersebut dapat sangat diuntungkan dengan bergabungnya AS dalam *Paris Agreement*. Selain itu, dalam bidang energi, China menempati posisi pertama sebagai pemasok utama batu bara sekitar 47% dari total pasokan batubara di dunia. Sedangkan, AS berada di peringkat kedua setelah China yang memasok sekitar 13% dari total pasokan batu bara di dunia sekaligus konsumen batubara terbesar. Kekhawatiran Trump dan kalangan konservatif terhadap kemungkinan menguatnya daya saing industri China dan India dapat melemahkan industri-industri di AS itu sendiri menjadi salah satu pertimbangan utama. Singkatnya, keputusan Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari *Paris Agreement* didorong oleh kepentingan politik domestik Amerika Serikat yang didasarkan pada platform Partai Republik dan preferensi pribadi Presiden Donald Trump.

Keluarnya AS dari *Paris Agreement* menyebabkan ketidakpastian dalam kepemimpinan tata kelola iklim global. Ketidakpastian tersebut dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi China. Meskipun, perkembangan ekonomi dan peningkatan pembangunan di China sangat tinggi, posisi

⁷⁷ UNFCCC, “*Climate Finance*” diakses dari <https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/climate-finance-in-the-negotiations> pada 8 Februari pukul 22.01 WIB

⁷⁸ Op. cit.

China sebagai negara berkembang masih lemah dalam hal penelitian iklim maupun kepemimpinan global. Upaya China bersama EU (*European Union*) juga tidak efektif dikarenakan terlepas dari jatuhnya pangsa emisi EU, EU dihadapkan dengan berbagai permasalahan keuangan, terorisme, pengungsi, dan Brexit. Permasalahan-permasalahan tersebut, terutama Brexit, melemahkan peran EU dalam kepemimpinan global.

Dengan terbangunnya kekuasaan produktif AS dalam rezim perubahan iklim, di mana AS berkontribusi hingga 18,89% emisi gas karbon.⁷⁹ AS juga merupakan pendonor utama dalam pendanaan, alih teknologi, dan pembangunan kapasitas negara-negara berkembang yang memiliki pengaruh besar dalam mekanisme *Paris Agreement*, maka saat AS memutuskan untuk menarik diri dari *Paris Agreement*, kekuasaan produktif AS tidak akan hilang begitu saja. Keluarnya AS dalam *Paris Agreement* ini tidak serta merta membuat dunia mempertanyakan kepemimpinan AS dalam rezim perubahan iklim. Jika diamati kembali, hal itu akan semakin mempertegas posisi kepemimpinan global AS sebagai satu-satunya negara yang dianggap adidaya. Melalui kekuasaan produktif AS, ketergantungan rezim perubahan iklim terhadap keberadaan AS akan semakin nampak jelas karena perilaku dan tindakan AS akan mempengaruhi perilaku dan tindakan negara-negara lain dalam bentuk ketidakpuasan dan keraguan negara-negara industri maupun negara-negara sekutu AS terhadap efektivitas rezim perubahan iklim sebagai efek domino dari penarik diri AS.

⁷⁹ Climate Analytics, “*Paris Agreement Ratification Tracker*”, diakses dari <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/> pada 7 Maret 2018 pukul 19.16 WIB.